



Implementasi Kebijakan Budaya Tertib dan Disiplin Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Gebog Kudus

Sudiharto

SMA Negeri 1 Gebog, Kudus, Indonesia

sudihartokudus@gmail.com

Abstract

The quality of education can be achieved if all components of education can run according to their roles. The education component can be seen from the way the policy is implemented. In this research, it also departs from problems related to the implementation of the policy of upholding an orderly culture and discipline at SMAN 1 GEBOG Kudus. The qualitative research approach studied is based on the theory of policy implementation from George Edward III (Communication, Resources, Dispositions/attitudes of implementers, and Bureaucratic Structure) as well as the quality of education in SMA N 1 GEBOG. The results showed that 1) The communication carried out by the implementor was carried out well; Application and Development of Resources in Policy Implementation for selecting executive staff, the information conveyed, authority and facilities are given according to the main duties and responsibilities of each which are integral and coherent in supporting the improvement of education quality; The disposition/attitude of the implementor is carried out based on the personal capabilities of all teachers, while the incentives received are not a problem because it is a moral responsibility as an educator; The bureaucratic structure at SMAN 1 GEBOG Kudus has implemented Standard Operating Procedures (SOP) related to a culture of order and discipline strictly to all elements in SMA N 1 GEBOG in fragmentation and integrated manner. 2) The quality of education at SMA N 1 GEBOG is shown by the increasing understanding of all school elements regarding the implementation of policies to promote an orderly and disciplined culture. The teacher, environment, and policy support factors are the driving force for improving the quality of education.

Keyword: *education policy; quality of education; culture of order; culture of discipline*

Abstrak

Kualitas pendidikan dapat dicapai apabila semua komponen pendidikan dapat berjalan sesuai dengan peranannya. Komponen pendidikan dapat dilihat dari cara pengimplementasian kebijakan. Dalam penelitian ini juga berangkat dari permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penegakan budaya tertib dan disiplin di SMAN 1 GEBOG Kudus. Pendekatan penelitian kualitatif yang dikaji berdasarkan teori Implementasi kebijakan dari George Edward III (Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/sikap implementor dan Struktur Birokrasi) serta kualitas pendidikan di SMA N 1 GEBOG. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Komunikasi yang dilakukan oleh implementor terlaksana dengan baik; Penerapan dan Pengembangan Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan dalam sudut pandang pemilihan staf pelaksana, informasi yang disampaikan, wewenang serta fasilitas diberikan sesuai tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing yang integral dan koheren dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan; Disposisi/sikap implementor dilaksanakan berdasarkan kapabilitas personal dari seluruh guru, sedangkan insentif yang diterima tidak menjadi persoalan karena menjadi tanggungjawab moral sebagai pendidik; Struktur birokrasi di SMAN 1 GEBOG Kudus telah menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) yang berkaitan dengan budaya tertib dan disiplin secara ketat kepada seluruh elemen di SMA N 1 GEBOG secara fragmentatif dan terintegrasi. 2) Kualitas pendidikan di SMA N 1 GEBOG ditunjukkan dengan semakin pahami seluruh elemen sekolah mengenai implementasi kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin. Faktor guru, lingkungan, maupun dukungan kebijakan menjadi daya dorong peningkatan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan; kualitas pendidikan budaya tertib; budaya disiplin

A. Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan saat ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas terutama dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas pula, sehingga pembinaan dan pengembangan pendidikan harus kita optimalkan mulai dari pendidikan dasar.

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Mulyasa, 2004). Maraknya kenakalan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa sehingga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Munculnya kebijakan ini mempertegas diterapkannya pendidikan karakter di. Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti bahwa penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai berjenjang dari mulai sekolah dasar, untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus dimulai sejak dari masa orientasi siswa baru sampai dengan kelulusan. Hal ini termasuk kedisiplinan pada siswa

Namun ketidak disiplinian masih banyak terjadi di masyarakat, bahkan bukan hanya menyangkut penggunaan waktu melainkan juga nampak dalam bentuk berbagai pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sikap disiplin perlu ditegakkan. Hal ini sesuai dengan permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah pada pembahasan budaya dan lingkungan sekolah membahas tentang dasar penetapan tata tertib di sekolah/madrasah, yaitu (1) Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan. (2) Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah/madrasah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib. (3) Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite (Idris, 2009)(Mustari et al., 2014).

Jadi tata tertib merupakan aturan atau peraturan yang baik merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, tata tertib merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Aturan-

aturan ketertiban dalam keteraturan tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan. Tata tertib sekolah merupakan patokan-patokan atau standar untuk hal-hal tertentu. Sesuai dengan keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 158/c/kep/T.81 tanggal 24 September 1981. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama makhluk Allah swt. Ketertiban sekolah tersebut dituangkan dalam sebuah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik, guru dan karyawan administrasi. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan peserta didik telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari peserta didik akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah (Fattah, 2019). Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi tata tertib sekolah sebagai wadah untuk mewujudkan disiplin merupakan bagian dari pengelolaan kelas yang juga banyak dibicarakan dan dirumuskan oleh baik guru bidang studi maupun guru kelas. Urgensitas tata tertib peserta didik dalam kelas akan sangat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan, termasuk efektivitas belajar para peserta didik di SMAN 1 Gebog.

Tata tertib adalah suatu hal yang mutlak dilakukan dan tidak hanya untuk efektivitas belajar, melainkan juga berguna untuk menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang kondusif. Bahkan tata tertib sangat penting diterapkan dalam segala aspek, termasuk instansi pemerintah maupun swasta. Keberhasilan seseorang sangat bergantung pada kekonsistenan atau kedisiplinannya dalam menggeluti suatu pekerjaan. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam mempersiapkan generasi baru yang mampu menjadi penerus dan pelaksana pembangunan di segala bidang. Umaedi (2009:3) mengungkapkan bahwa: "peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang integral dengan proses peningkatan sumber daya manusia". Oleh karena itu pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing secara global, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, sekolah, birokrat atau pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, orang tua dan seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia.

Kualitas pendidikan dapat dicapai apabila semua komponen pendidikan dapat berjalan sesuai dengan peranannya. Salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah adalah peranan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan nasional, fenomena yang terjadi di Kudus sebagai daerah yang mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas, senantiasa harus meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut demi kemajuan kedepan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana peranan kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut, dalam meningkatkan kinerja guru (Kurniadin et al., 2013). Seperti diketahui dalam kapasitas Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan kinerja para guru melalui kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang bertanggung jawab pula dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka sekolah merupakan suatu lembaga organisasi yang di dalamnya mengatur kegiatan proses pembelajaran dan tergambar bahwa proses pelaksanaan pendidikan di sekolah itu merupakan proses pendewasaan yang melibatkan semua pihak.

Dalam beberapa jurnal penelitian dikemukakan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar antara lain: Strategi pengembangan struktur birokrasi, Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, dan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata Husaeni (2014:3). Sedangkan Sari (2016:49) menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Siswa Sebagai Budaya Sekolah dalam Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia Di SMA Negeri 11 Samarinda belum berjalan secara optimal karena faktor internal siswa di SMA Negeri 11 Samarinda. Moyo (2014:1) menyebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi yang mapan antara praktik disiplin di sekolah-sekolah dan prinsip-prinsip strategi hukuman alternatif ke fisik. Acetylna (2015:55) memaparkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan mengalami hambatan diantaranya kurangnya profesionalisme, dampak negative globalisasi, kurangnya peran orang tua dan masyarakat. Menerapkan metode “ngerti, ngrasa, nglakoni”

Dari beberapa jurnal tersebut, ada beberapa kesamaan yaitu mengenai implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai implementasi kebijakan. Namun, letak perbedaannya adalah mengkaji implementasi kebijakan penegakan budaya tertib dan disiplin. Titik kajian ini menjadi penting karena setiap sekolah, pasti memiliki visi dan misi yang berkorelasi erat dengan permasalahan yang akan diatasi. Sehingga butuh penyusunan rencana kerja, penanganan, pengawasan hingga kerjasama dengan semua pihak (pendidik, tenaga

kependidikan, masyarakat sekitar sekolah) agar visi dan misi yang telah dirumuskan dapat tercapai. Guna tercapainya visi misi tersebut, mutlak diperlukan penegakan budaya tertib dan disiplin kepada semua pihak di lingkungan sekolah. Hal inilah yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Sikap Implementor sebagai Upaya Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin

Hasil pengamatan dan penelusuran bukti otentik yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh implementor (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun pegawai tata usaha menunjukkan bahwa implementor terkait tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan budaya tertib dan disiplin.

Namun, dalam kegiatan ini, insentif yang diberikan tidaklah seberapa. Dari hasil wawancara, para narasumber mengatakan bahwa mereka melaksanakan tugas implementasi peningkatan budaya tertib dan disiplin bukanlah sebuah proyek yang menghasilkan nominal tertentu. Namun lebih daripada itu, mereka menganggap bahwa pengimplementasian kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin merupakan tanggungjawab moral sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang tenaga kependidikan. Dari sisi siswa juga merasa bahwa kebijakan ini merupakan langkah baik yang harus didukung secara bersama sekaligus dilakukan pembiasaan agar mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter moral tertib dan disiplin yang baik. Selain tanggungjawab moral pendidik, kebijakan ini dinilai oleh para guru sebagai salah satu *pengejawantahan* dari kode etik profesional seorang guru. Sehingga insentif yang menyertai kebijakan ini bukanlah hal utama.

Standar Operating Procedures (SOP) yang berkaitan dengan budaya tertib dan disiplin juga diterapkan dengan ketat kepada seluruh elemen di SMA N 1 Gebog. Dibuatkannya tata tertib baku beserta sanksi-sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran juga disebutkan dengan jelas. Hal ini berimplikasi pada kepatuhan sekaligus pembiasaan masing-masing individu dalam komponen di SMA N 1 Gebog berjalan secara integral dan koheren.

Hambatan yang muncul sekaligus solusi yang diambil dalam pengimplementasian kebijakan meningkatkan budaya tertib dan disiplin di SMA N 1 Gebog antara lain (1) Mengubah pola pikir dan pola perilaku untuk berlaku tertib dan disiplin. Solusinya diberikan

kebijakan sistem kredit poin sikap karakter. Kebijakan penerapan sistem poin di sekolah juga mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, agar lebih jelas dalam pemberian sanksi terhadap siswa, menerapkan kedisiplinan dan ketertiban pada tiap diri siswa, menghindari terjadinya kekerasan fisik. (2) Beberapa guru dan pegawai tata usaha menolak kebijakan ini dengan alasan memiliki urusan pribadi. Solusinya penerapan tata tertib guru dan pegawai secara konsekuen. Dengan penerapan ini beberapa guru menjadi lebih aware dengan tugas dan tanggungjawabnya. (3) Jumlah siswa pelaku pelanggaran membludak pada awal penerapan kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin di SMA N 1 Gebog. Solusinya dengan cara sosialisasi secara terus menerus dalam berbagai kegiatan siswa. Penambahan fasilitas fisik guna menunjang implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin juga disiapkan dengan matang. berbagai macam spanduk, ajakan, himbauan hingga quote-quote motivasi semua diarahkan untuk membudayakan bersikap tertib dan disiplin.

Reformasi pendidikan yang sangat monumental dalam sejarah pendidikan di Indonesia, dimana otoritas yang sangat besar diberikan langsung pada sekolah. Sekolah bisa mengembangkan inovasinya masing-masing dalam mengembangkan perlakuan pada siswa dalam belajar, bahkan sekolah diberi kewenangan untuk menetapkan apakah akan *full day school* atau *part day school* dalam penggunaan waktu belajar. Selain itu, sekolah diberikan keleluasaan untuk menyusun sendiri buku teks yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang disepakati, atau membeli buku-buku karya guru lainnya menjadi salah satu tantangan pendidikan abad 21 (Hartani, 2011). Dalam hal ini, hal terpenting sekaligus menjadi tekannya adalah bahwa di *end product*-nya siswa berprestasi, siap diuji, sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah atas usulan masyarakat. Karena itu, bila prestasi siswa menurun, maka masyarakat tidak bisa menyalahkan kantor dinas pendidikan kabupaten/kota. Sebaliknya, mereka bisa bertanya pada kepala sekolah dan para gurunya, karena soal kurikulum dan pembelajaran seluruhnya menjadi kewenangan penuh sekolah.

Berkaca dari hal diatas, maka peran kepala sekolah menjadi sangat besar. Dia harus kuat dan memiliki *strong leadership* untuk mendorong seluruh gurunya bekerja total dalam mendidik murid-muridnya, memiliki visi untuk kemajuan sekolah, konsisten dengan visinya, tapi tetap demokratis dan menghargai pandangan para koleganya (Nafisah & Zafi, 2020). Kepala sekolah juga harus memiliki ekspektasi yang baik pada para siswanya, memberikan penguatan *basic skill* untuk anak didiknya, sehingga bisa berkembang dengan baik dalam profesi apapun, dan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk para guru dan karyawan bekerja, serta menciptakan suasana yang nyaman untuk para siswa

belajar. Selanjutnya, Kepala sekolah juga harus dedikatif untuk sekolahnya, dan bekerja total bagi kemajuan sekolahnya.

Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan kualitas pendidikan yang integratif. Di Indonesia, aturan mengenai kualitas pendidikan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: standar isi, standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Hal ini menjadi panduan baku yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah termasuk kepala sekolah SMA N 1 Gebog untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat kebijakan budaya tertib dan disiplin kepada seluruh warga sekolah SMA N 1 Gebog.

2. Implementasi Kebijakan Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu (1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. (3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan (Mustari et al., 2014).

Dalam penelitian ini, komunikasi yang terjalin dalam pengimplementasian kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kesalahpahaman mengintepretasikan kebijakan ini masih terjadi, baik oleh guru, pegawai tata usaha, maupun oleh siswa. Hal ini berarti pada variable kejelasan komunikasi belum dipahami penuh oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut (Safitri & Zafi, 2020). Akan tetapi, karena variabel konsistensi yang ditunjukkan oleh kepala sekolah sebagai pucuk pengambil kebijakan ini, maka segala macam ekses negatuf yang timbul dapat teratasi dengan baik.

Dalam konteks sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, Implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Indikator dalam variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu Pertama, Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kepala sekolah SMA N 1 Gebog menjabarkan secara rinci tugas pokok

dan fungsi dari masing-masing wakil kepala, guru, maupun staf tata usaha guna mendukung implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin. Selain pendelegasian tugas dan tanggungjawab melalui SK tersebut, kepala sekolah juga telah berusaha untuk menyesuaikan tugas yang diberikan kepada setiap penanggungjawab kapabel dan kompeten.

Kedua, informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan (Zafi, 2016). Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kepala sekolah SMA N 1 Gebog menjabarkan secara rinci tugas pokok dalam bentuk Surat Keputusan. Hal ini membawa dampak bahwa implementor mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan pengimplementasian kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin.

Ketiga, wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Penjabaran ini diperjelas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Implementasi Budaya Tertib dan Disiplin di SMA N 1 Gebog. Pendelegasian wewenang secara formal ini tentunya membawa dampak positif bagi seluruh pihak, karena didalamnya memuat tanggungjawab serta etika moral pimpinan maupun seluruh staf. Sehingga kekuatan para implementator dimata publik terlegitimasi.

Keempat, Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dukungan fasilitas fisik guna menunjang implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin juga disiapkan dengan matang. berbagai macam spanduk, ajakan, himbuan hingga quote-quote motivasi semua diarahkan untuk membudayakan bersikap tertib dan disiplin.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah Pengangkatan birokrat (Havigerova, 2013).

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan lembaga terkait. Hasil pengamatan dan penelusuran bukti otentik menemukan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh implementor (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun pegawai tata usaha menunjukkan bahwa implementor terkait tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya (Musfah, 2015). Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan budaya tertib dan disiplin.

Namun, dalam kegiatan ini, insentif yang diberikan tidaklah seberapa. Dari hasil wawancara, para narasumber mengatakan bahwa mereka melaksanakan tugas implementasi peningkatan budaya tertib dan disiplin bukanlah sebuah proyek yang menghasilkan nominal tertentu. Namun lebih daripada itu, mereka menganggap bahwa pengimplementasian kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin merupakan tanggungjawab moral sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang tenaga kependidikan. Dari sisi siswa juga merasa bahwa kebijakan ini merupakan langkah baik yang harus didukung secara bersama sekaligus dilakukan pembiasaan agar mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter moral tertib dan disiplin yang baik. Selain tanggungjawab moral pendidik, kebijakan ini dinilai oleh para guru sebagai salah satu pengejawantahan dari kode etik professional seorang guru. Sehingga insentif yang menyertai kebijakan ini bukanlah hal utama.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. *Standar Operating Procedures* (SOP) yang berkaitan dengan budaya tertib dan disiplin juga diterapkan dengan ketat kepada seluruh elemen di SMA N 1 Gebog. Fragmentasi dalam upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan pendukung peningkatan budaya tertib dan disiplin juga terbagi sesuai dengan porsi dan takaran masing-masing bidang.

Selain itu, dibuatkannya tata tertib baku beserta sanksi-sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran juga disebutkan dengan jelas. Hal ini berimplikasi pada kepatuhan sekaligus pembiasaan masing-masing individu dalam komponen di SMA N 1 Gebog berjalan secara integral dan koheren.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang integral dengan proses peningkatan sumber daya manusia. SMA N 1 Gebog cukup mampu menyiapkan sumber daya

manusia yang memiliki daya saing secara global, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, sekolah, birokrat atau pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, orang tua mampu mengambil berperan dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia siswa di SMA N 1 Gebog.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin pahamnya seluruh elemen sekolah mengenai implementasi kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin. Namun peneliti melihat bahwa, *support* dari elemen sekolah harus terus menerus disinergikan dari waktu ke waktu. Dari sisi guru, guru di SMA N 1 Gebog sudah memiliki kompetensi yang profesional karena 80% guru sudah bersertifikasi. Faktor lingkungan juga mendukung keberlangsungan kualitas pendidikan dalam pengimplementasian kebijakan ini. Sekolah yang luas dan representatif mampu menghadirkan iklim penerapan kebijakan ini berjalan secara koheren dan integral.

Akan tetapi, kualitas pendidikan di SMA N 1 Gebog harus terus mendapatkan monitoring dan evaluasi secara kontinyu. Hal ini karena komponen elemen siswa dari tahun ke tahun berganti, sehingga perlu sosialisasi dan pembiasaan secara integral. Sehingga kualitas pendidikan yang saat ini cukup bagus dapat terus ditingkatkan.

C. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin Pada Guru, Pegawai Tata Usaha, dan Siswa di SMA N 1 Gebog Kudus dikatakan berhasil pada komunikasi karena variabel transmisi penyaluran komunikasi; dan konsistensi pelaksanaan komunikasi kebijakan dilaksanakan baik. Namun variabel Kejelasan komunikasi pada awal pelaksanaan kebijakan ini terdapat kesalahpahaman menginterpretasikannya Akan tetapi, karena variabel konsistensi komunikasi pada pihak-pihak yang belum memahami esensi kebijakan ditunjukkan oleh kepala sekolah secara terus menerus, maka segala macam eksekusi negatif yang timbul dapat teratasi dengan baik. Penerapan dan Pengembangan Sumberdaya dikatakan berhasil pada elemen indikator yaitu diantaranya *staf*, terjadi pen delegasian sesuai keahlian dan kemampuan (kompeten dan kapabel) karena tergambar pada penjabaran secara rinci tugas pokok dan fungsi dari masing-masing wakil kepala, guru, maupun staf tata usaha guna mendukung implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin. Kedua *Informasi*, dalam kaitan dengan indikator ini Kepala sekolah SMA N 1 Gebog menjabarkan secara rinci tugas pokok dalam bentuk Surat Keputusan.

Hal ini membawa dampak bahwa implementor mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan pengimplementasian kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin. Ketiga, *Wewenang*, penjabaran ini diperjelas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah secara formal tentang pengimplementasian

budaya tertib dan disiplin di SMA N 1 Gebog membawa dampak positif bagi seluruh pihak, karena didalamnya memuat tanggungjawab serta etika moral pimpinan maupun seluruh staf. Sehingga kekuatan para implementator dimata publik terlegitimasi; Keempat, *Fasilitas*. fasilitas fisik guna menunjang implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin juga disiapkan dengan matang. berbagai macam spanduk, ajakan, himbauan hingga *quote-quote* motivasi semua diarahkan untuk membudayakan bersikap tertib dan disiplin;

Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin di SMA N 1 Gebog Kudus antara lain: 1) Mengubah pola pikir dan pola perilaku untuk berlaku tertib dan disiplin. Solusinya diberikan kebijakan sistem kredit poin sikap karakter. Kebijakan penerapan sistem poin di sekolah juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk: (mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa; agar lebih jelas dalam pemberian sanksi terhadap siswa; penerapakan kedisiplinan dan ketertiban pada tiap diri siswa; penghindaran terjadinya kekerasan fisik); 2) Beberapa guru dan pegawai tata usaha menolak kebijakan ini dengan alasan memiliki urusan pribadi. Solusinya penerapan tata tertib guru dan pegawai secara konsekuen. Dengan penerapan ini beberapa guru menjadi lebih aware dengan tugas dan tanggungjawabnya; 3) Jumlah siswa pelaku pelanggaran membludak pada awal penerapan kebijakan peningkatan budaya tertib dan disiplin di SMA N 1 Gebog. Solusinya dengan cara sosialisasi secara terus menerus dalam berbagai kegiatan siswa. Penambahan fasilitas fisik guna menunjang implementasi kebijakan budaya tertib dan disiplin juga disiapkan dengan matang. berbagai macam spanduk, ajakan, himbauan hingga *quote-quote* motivasi semua diarahkan untuk membudayakan bersikap tertib dan disiplin.

Daftar Pustaka

- Abuddin, H. Nata. Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum. Edisi 1-2, Cet, II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur: ABIM, 1980.
- Al-Syaibany. Omar Mohammad al-Toumy. *Filsafat Pendidikan Islam*, (terj.) Hasan Langgulung, dari Filsafat al-Tarbiyah al-Islamiyah, Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prkatek*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Athiyah, Muhammad. al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha, Cet, I; Mesir: Isa al-

- Baby, 1975.
- Adiwikarta, Sudardja. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II Kurikulum untuk Abad 21*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Ahmadi. *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Cet. I; Yogyakarta: Aditiyah Media, 1992.
- Alewine J. Thomas. *Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2002
- A.S. Homby, Ev. Gatenby, H. Wake Field *The advanced Learner's Dictionary of Current English*, Orxford: Second Edition, 1962.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prkatis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bateman Thomaas, dkk. *Seni Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis Kinerja*, Jakarta: Elex Media Kamputindo, 1992.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief*, New York: Harper & Row, edisi paper back, 1976.
- Bolland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.
- Chan, Sam M., Tuti T. Sam, *Analisis Swot, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Edisi 1-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Depdikbud. *Kepemimpinan*. Jakarta: Dikdasmen. 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2007.
- Djamali, al-Fadhil, *Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Cet, II; Jakarta: Golde Trayon Press, 1992.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fattah, N. (2019). *Landasan manajemen pendidikan*. <http://www.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/61231>
- Hartani, A. (2011). *Manajemen Pendidikan*. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/1614>
- Havigerova, J. M. (2013). *Teacher's subjective definition of family*. *4th International Conference on New Horizons in Education*, 106, 2507–2515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.288>
- Idris, R. (2009). *Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi Kognitif*. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 12(2), 152–172. <https://doi.org/10.24252/lp.2009v12n2a3>

- Kurniadin, D., Machali, I., & Sandra, M. (2013). *Manajemen pendidikan: konsep & prinsip pengelolaan pendidikan*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8733
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=995
- Musfah, J. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=thVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA135&dq=manajemen+pendidikan&ots=IE2nSs3I1D&sig=jyfl-fdVwgMhx2ZV-9XmA6ZMv3c>
- Mustari, M., Taufiq Rahman, M., & Persada, R. (2014). *MANAJEMEN PENDIDIKAN*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/15943>
- Nafisah, F. T., & Zafi, A. A. (2020). Model Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Perspektif Islam di Tengah Pandemi Covid-19. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 08(1), 1–20. <https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.1.1-20>
- Safitri, E. N., & Zafi, A. A. (2020). Konsep Humanisme Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(1), 78–89. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/3842>
- Zafi, A. A. (2016). *Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 Purworejo*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.